

## DAFTAR RUJUKAN

- Adji, Indriyanto Seno. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Publik Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch.
- Ady Thea DA, “Tiga Indikator ‘Autocratic Legalism’ dalam Kebijakan Negara”, dalam artikel online Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-1t6102bdb6645ee/>. Diakses pada Minggu 28 Mei 2023 Pukul.
- Agus Setiawan, *Indeks Persepsi Korupsi Malaysia Menurun*, diakses di <https://www.antaraneews.com/berita/2665945/indeks-persepsi-korupsi-malaysia-menurun> pada 20 Maret 2023
- Agustine, Oly Viana dkk. 2019. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 2.
- Akbar. 2021. Skripsi. “Fungsi dan Wewenang KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Al Atok, A. Rosyid. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Prundang-undangan*. Malang: Setara Press.
- Alatas. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta:LP3ES.
- Amelia Rizky, *Strategi Independent Commission Against Corruption (ICAC) Sebagai Role Model Bagi KPK*, diakses melalui <https://www.kaskus.co.id/thread/60e2ffbd13d50e4b603c9cb0/strategi-independent-commission-against-corruption-icac-sebagai-role-model-bagi-kpk/> pada tanggal 30 Maret 2023
- Amsari, Feri. 2020. *Hasil Penelitian “Penataan Ulang Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Sistem Ketatanegaraan”*, Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Anna Marpaung, Lintje. 2012. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)”. *Pranata Hokum Volume 7 Nomor 1*
- Ariani, Devi & Lusy Liany. “Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau

dari Azas-azas pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal ADIL-Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1, hal. 49

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independensi>. pada tanggal 5 Februari 2022

Benardy Ferdiansyah, “Melihat Landasan Hukum Proses Alih Status Pegawai KPK”, dalam artikel *online* diunggah pada 13 Mei 2021 dalam [m.antaranews.com/amo/b](http://m.antaranews.com/amo/b). Diakses pada Kamis, 11 Mei 2023, Pukul 19:24 WIB

Berman, L dan RM. A. B. Kusuma. 2014. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: edisi revisi, FH UI.

Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Cynthia Dewi Kusumastuti & Ismunarno. 2015. “Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Recidive*, Volume 4 No. 3.

Darwan, Prinst. 2012. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Perdana Menteri. 2019. *Rencana Nasional Pemberantasan Korupsi 2019-2023*, Pusat Pemerintahan Nasional, Integritas, dan Antirasual.

Doni Anggara. 2020. Skripsi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” (Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

DPR RI. 2001. “Risalah Sidang Pembahasan UU KPK 2002: Agenda pembahasan posisi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia”, *Artikel DPR RI*: Jakarta

Facundo Chrysnha, “51 Pegawai KPK Dipecat, Ingat Lagi Pesan Presiden Jokowi Soal Pemberhentian”, diakses dari [Pegawai KPK Dipecat, Ingat Lagi Pesan Presiden Jokowi Soal Pemberhentian-Halaman2-TribunNews.com](https://www.tribunnews.com) pada tanggal 16 Maret 2023.

- Fatwa, Indra dkk. 2022. “Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Reformasi Birokrasi”, *Jurnal Literasi Hukum*, Volume 6 nomor 2.
- Febari, Riski. 2015. *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fox, William F., Jr. 2000. *Understanding Administrative Law*. Danvers: Lexis Publishing.
- Hadi. Sutrisno. 1993. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Herdiansyah. 2019. “Membunuh Independensi KPK”, makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kelembagaan Dewan Pengawas dan Organ Pelaksana Pengawasan KPK”, yang diselenggarakan oleh Pukat. Jakarta: FH-UGM.
- Harahap, Krisna. 2005. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri.
- Hendra Nurtjahjo, Hendra. 2015. *Lembaga Badan Komisi Negara Independen di Indonesia: Tujuan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 3.
- Hindaru Tri Hanggoro, *Mengawasi Aparatur Sipil Negara*, diakses dalam (<https://historia.id/modern/mengawasi-aparatur-negara>), diunduh pada 7 Maret 2022.
- <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/01/PERKA-BKN-Nomor-19-Tahun-2014-Organisasi-dan-Tata-Kerja-BKN-pdf>. Diakses pada Minggu 28 Mei 2023, Pukul 08:07 WIB
- <https://www.komnasham.go.id>. Dikses pada Selasa 16 Mei 2023, Pukul 15:15 WIB
- Hubberts, Leo W.J.C. 2017. *Anticorruption Strategies: The Hongkong Model in International Context*, Journal Routledge Taylor & Francis Group Public Integrity, United Kingdom.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cet-1. Yogyakarta: ULL Press.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 24.

- Huda, Nurul. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Indrayana, Denny. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. 2021. “*Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018*”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 9, Nomor 1.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. “Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”, makalah hukum disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pasca perubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, pdf
- K, Cyntia Dewi dan Ismunarno. 2015. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam Pemberantasan Korupsi*, *Recidive*, Vol.4 No.3.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Arti kata independen*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022
- Kartika S. Wahyunigrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol4, No.2, Hal. 241.
- Katharina, Riris. 2018. *Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*. Pusat Penelitian DPR RI Spirit Publik. Jakarta:reformasi.
- KBBI (Online), *Definisi Aparatur Sipil Negara*, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/>, pada 4 Maret 2022
- Keppres RI Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- Ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dijadikan Undang-Undang. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak terlalu jauh berbeda dengan ketentuan No. PRT-PM-06/1957.
- Kholid, M. Abdul. 2004. *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.11 No.26.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara*, melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara-pada-15-Maret-2023>
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5
- Konsiderans menimbang huruf b dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- KPK, *Menengok Strategi ICAC Hongkong Dalam Menangani Korupsi*, melalui <http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-kpk-kegiatan/325-menengok-strategi-icac-hong-kong-menangani-korupsi-pada-31-Maret-2023>
- KPK, *Sekilas KPK*, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi-pada-2-Februari-2023> .
- Law, Harvard. 2000. Review, *The New Sapparation of Powers Bruce Ackerman*, United State.
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 2
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020.
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lembaran Negara Republik Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Magnis Suseno, Frans. 1994. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Priceton University Press
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gamamedia

- Mahfud MD. Moh. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-IV.
- Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Mochtar, Zainal Arifin. 2016. *Lembaga Negara Independen “Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Monika, Andini dkk. 2019. “Program Peningkatan Kesejahteraan Kapasitas Keluarga”, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Volume 3 nomor 2.
- Muhammad Adres Akmaludin. 2020. Skripsi. “Politik Hukum dan Dampak Terhadap Independensi KPK Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mulya Lubis, Todung. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES
- Musanef, Rosdakarya. 2017. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muslim, Mahmuddin. 2014. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi.
- Muslimin, Mahmuddin. 2016. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (2007) hlm. 108
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Pasal 18A ayat (6) PP No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 4 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pendapat Mahkamah, Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Hal. 269.

- Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- Penjelasan Umum Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan
- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 70/PUU-XVII/2019.
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Pradiptyo dan Rimawan, *Sejarah Panjang Pemberantas Korupsi di Indonesia*, Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantas-korupsi-di-indonesia>) pada 3 Maret 2022
- Purnomo, Chrisdianto Eko. 2010 “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3.
- Putri, Prila Desita & Septi Nurwijayanti 2021. “*Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019*”, *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Volume 1, Nomor 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XIX/2021.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahayu, Amin. “*Sejarah Korupsi di Indonesia*”, Amanah, Oktober 2014, hal.35
- Rishan, Idul. 2018. “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,” *DialogiaJuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 10, Nomor 1.
- Shandy Utama Andrew, Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Vol 1 (1), Hal 10.
- Simabura, Charles. 2016. *Pengisian Jabatan Lembaga Negara Independen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Simbolon, Huyugo. *ASN Adalah Pegawai yang Bekerja di Instansi Pemerintah*, diakses dari (<https://hot.liputan6.com/read/4627004/asn-adalah-pegawai-yang-bekerja-di-instansi-pemerintah-kenali-fungsi-dan-tugasnya>) Pada tanggal 2 Februari 2022
- Smith, Theodore. 1971. *Corruption, Tradition and Change* Vol 11 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudjana, Eggy. 2018. *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books.
- Sulton Asnawi, Habib. 2013. “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013
- Suraji. 2018. *Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Direktur Eksekutif Matapena Institut.
- Suyatmiko, Wawan Heru and Alvin Nicola. 2019. “Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 5, Nomor 2.
- Suyatmiko, Wawan Heru. 2021. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020,” *Jurnal Integritas* 7, No. 1.
- Syamsudin, Muhammad. 2005. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syifa Hanifah, “Deretan Revisi Undang-undang Kontroversial Jelang Akhir Jabatan DPR dan Jokowi-JK”, dalam berita online *Liputan6.com*, diunggah pada 24 September 2019. Diakses pada Senin, 29 Mei 2023, Pukul 18:51 WIB.
- TAP MPR No.X/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001
- Tasya Rahmi Agung Putri. 2022. Skripsi. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara, (Makassar: Universitas Hassanudin.
- Tim Detikcom, “Penjelasan Lengkap KPK soal ‘Tes Wawasan Kebangsaan’ Pegawai Jadi ASN”, *detikNews*, diunggah pada Rabu 5 Mei 2021. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-5559279/penjelasan-lengkap-kpk-soal->



[tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-jadi-asn](#). Diakses pada Jumat, 12 Mei 2023, Pukul 07:07 WIB

Topan Yuniarto, *Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi*, melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/komisi-pemberantasan-korupsi> diakses pada 2 Februari 2023.

Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 12 Tahun 2011 Tentang tentang pebentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 23.

Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wahyu, Widodo. 2021. Tesis. "Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". Padang: Universitas Andalas.

Wan Murshida dan Mazlena. 2019. *Combating Corruption in Malaysia: An Analysis of the Anti-Corruption Commission Act 2009 with Special Reference to Legal Enforcement Body*, Journal of Administrative Science Vol.16, Issue 2, Faculty of Law, Universiti Teknologi MARA, Malaysia.

Wibawa, Samodra. 2005. *Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Widjaja, A.W. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.

Wiedzianty Septiana Wulandari. 2021. Skripsi "Analisis Terhadap Persaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah". (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Winters, Jeffrey A. 2011. “*Oligarchy and Democracy*”, Jurnal The American Interest Volume VII, 2 Holidays. The American Interest, Washington DC, 2011, hlm.20.
- Yasin M, Kebijakan Anti Korupsi dari Penguasa Militer, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da550bcc353b/kebijakan-antikorupsi-dari-penguasa-militer/>, diakses pada 29 Maret 2023
- Yasmirah MS, dkk. 2018. *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 05, No. 01.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zul Hendry Nov. 2020. Tesis. “Politik Hukum Perubahan Status Kelembagaan Pengawas Pemilu Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota”. *Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Zulkifli Hasan, *Membangun Masyarakat Berwawasan*, diakses melalui [Tinta Minda BERNAMA - Membina Masyarakat Berminda Benci Rasuah](#) pada 21 Maret 2023